Action Research Literate
Vol. 10, No. 7, July 2026
ISSN: 2808-6988

Peran Asurans Keberlanjutan dalam Memperkuat Transparansi Pengungkapan ESG: Studi pada Perusahaan Publik di Indonesia Tahun 2023–2025

Sandy Jenfa Utomo* , Herlin Tundjung Setijaningsih
Universitas Tarumanagara, Indonesia
Email: sandy.126251065@stu.untar.ac.id* , herlins@fe.untar.ac.id

Keywords:
Sustainability Assurance; ESG; Transparency; Sustainability Reporting; Public Companies

Abstract

Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure has become a key tool for enhancing transparency among public companies amid growing attention from investors, regulators, and the public regarding sustainable business practices. In Indonesia, sustainability reporting obligations have been strengthened through POJK No. 51/POJK.03/2017 regarding the implementation of sustainable finance for financial service institutions, issuers, and public companies. However, the increasing number of companies publishing sustainability reports does not yet fully guarantee the quality, reliability, and transparency of the ESG information disclosed. This research aims to analyze the role of sustainability assurance in strengthening the transparency of ESG disclosures among public companies in Indonesia during the 2023–2025 period. This study employs a descriptive qualitative approach using literature review and content analysis of regulations, institutional publications, reporting standards, and academic literature related to ESG and sustainability assurance. The research findings indicate that sustainability assurance plays a crucial role in enhancing ESG transparency through independent verification, improving data reliability, strengthening accountability, reducing the risk of greenwashing, and improving companies' internal control systems. Nevertheless, the effectiveness of sustainability assurance still faces challenges in the form of limited ESG data readiness, variations in assurance standards, audit costs, and companies' uneven understanding of ESG materiality. This research recommends strengthening ESG data systems, improving the quality of assurance providers, ensuring transparency in the scope of assurance, and preparing companies to meet more integrated sustainability disclosure standards.

Kata Kunci:
Asurans Keberlanjutan; ESG; Transparansi; Pelaporan Keberlanjutan; Perusahaan Publik

Abstrak

Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan publik di tengah meningkatnya perhatian investor, regulator, dan masyarakat terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Di Indonesia, kewajiban pelaporan keberlanjutan telah diperkuat melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Namun, meningkatnya jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan belum sepenuhnya menjamin kualitas, keandalan, dan transparansi informasi ESG yang disampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asurans keberlanjutan dalam memperkuat transparansi pengungkapan ESG pada perusahaan publik di Indonesia selama tahun 2023–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis isi terhadap regulasi, publikasi institusional, standar pelaporan, dan literatur akademik terkait ESG serta sustainability assurance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asurans keberlanjutan berperan penting dalam meningkatkan transparansi ESG melalui verifikasi independen, peningkatan reliabilitas data, penguatan akuntabilitas, pengurangan risiko greenwashing, serta perbaikan sistem pengendalian internal perusahaan. Meskipun demikian, efektivitas asurans keberlanjutan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kesiapan data ESG, variasi standar asurans, biaya pemeriksaan, serta belum meratanya pemahaman perusahaan terhadap materialitas ESG. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem data ESG, peningkatan kualitas penyedia asurans, transparansi ruang lingkup asurans, dan kesiapan perusahaan menghadapi standar pengungkapan keberlanjutan yang lebih terintegrasi.

PENDAHULUAN

Isu keberlanjutan telah menjadi bagian penting dari praktik bisnis modern. Perusahaan tidak lagi hanya dinilai berdasarkan kinerja keuangan, tetapi juga melalui kemampuan mengelola dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menjalankan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi jangka panjang (Al-Shaer & Zaman, 2018).

Bagi perusahaan publik, pengungkapan ESG memiliki peran strategis karena menjadi sarana komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Investor menggunakan informasi ESG untuk menilai risiko dan peluang jangka panjang. Regulator menggunakan informasi ESG untuk mengawasi kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Masyarakat menggunakan laporan ESG untuk memahami dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, transparansi pengungkapan ESG menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi perusahaan.

Di Indonesia, pengungkapan keberlanjutan memiliki dasar regulasi yang kuat melalui POJK No. 51/POJK.03/2017. Regulasi tersebut mengatur penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, sehingga laporan keberlanjutan menjadi bagian penting dari praktik pelaporan korporasi di Indonesia. Selain itu, lampiran POJK 51 juga menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan dapat disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau menjadi bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.

Periode 2023–2025 menjadi fase penting dalam perkembangan pengungkapan ESG di Indonesia. Bursa Efek Indonesia mencatat bahwa sampai Desember 2024, sebanyak 882 perusahaan tercatat atau sekitar 94% dari jumlah perusahaan tercatat di BEI telah menerbitkan laporan keberlanjutan untuk tahun pelaporan 2023. Data ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kepatuhan perusahaan publik terhadap pelaporan keberlanjutan.

Namun, peningkatan jumlah laporan keberlanjutan belum selalu sejalan dengan peningkatan kualitas transparansi pengungkapan ESG. Sebagian laporan masih cenderung bersifat naratif, menonjolkan program sosial perusahaan, tetapi belum menyajikan data ESG yang terukur, konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diverifikasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan karena laporan ESG yang tidak transparan dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan dan membuka ruang bagi praktik *greenwashing*.

Greenwashing merupakan kondisi ketika perusahaan menampilkan citra seolah-olah berkelanjutan, tetapi klaim tersebut tidak didukung oleh data, metodologi, atau bukti yang memadai. Dalam konteks perusahaan publik, *greenwashing* dapat merugikan investor dan masyarakat karena informasi yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, transparansi dalam pengungkapan ESG tidak cukup hanya dilakukan melalui penerbitan laporan, tetapi juga perlu didukung mekanisme verifikasi independen.

Salah satu mekanisme yang dapat memperkuat transparansi pengungkapan ESG adalah asurans keberlanjutan atau *sustainability assurance*. Asurans keberlanjutan merupakan proses pemeriksaan independen terhadap informasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan. Proses ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa data dan informasi ESG telah disusun berdasarkan kriteria tertentu, didukung bukti yang memadai, serta bebas dari salah saji material.

Urgensi asurans keberlanjutan semakin meningkat seiring dengan perkembangan standar pelaporan global. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Keberlanjutan telah mengesahkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2 pada 1 Juli 2025, dan standar tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Hal ini menunjukkan bahwa arah pelaporan keberlanjutan di Indonesia bergerak

menuju standar yang lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna laporan.

Selain itu, OJK juga mengembangkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia versi 2 pada tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan kerangka keuangan berkelanjutan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perusahaan publik perlu meningkatkan kualitas pengungkapan ESG agar selaras dengan arah regulasi, kebutuhan pasar, dan tuntutan transparansi.

Kepercayaan pemangku kepentingan mengacu pada keyakinan pemangku kepentingan terhadap keandalan, integritas, dan kredibilitas pengungkapan informasi perusahaan. Dalam konteks pelaporan ESG, kepercayaan sangatlah penting karena pemangku kepentingan umumnya tidak memiliki akses langsung terhadap praktik keberlanjutan internal perusahaan dan harus mengandalkan informasi yang diungkapkan untuk menilai tanggung jawab dan kinerja perusahaan. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa pelaporan ESG berkualitas tinggi dapat mengurangi asimetri informasi, meningkatkan reputasi perusahaan, dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Namun, sifat sukarela dari pelaporan ESG memberikan perusahaan keleluasaan yang besar atas isi pengungkapan, yang berpotensi mengarah pada pelaporan selektif atau praktik pengungkapan simbolis. Akibatnya, pelaporan ESG saja mungkin tidak cukup untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan kecuali didukung oleh mekanisme verifikasi yang kredibel. Jaminan keberlanjutan mengacu pada verifikasi independen atas pengungkapan ESG yang dilakukan oleh penyedia jaminan eksternal. Tujuan utama jaminan ini adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan laporan keberlanjutan dengan mengurangi bias manajemen dan asimetri informasi. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa jaminan keberlanjutan berkaitan dengan kualitas pelaporan yang lebih tinggi, transparansi yang lebih besar, serta persepsi pemangku kepentingan yang lebih baik.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait asurans keberlanjutan dan transparansi pengungkapan ESG. Simnett et al., (2009) melakukan studi internasional yang menemukan bahwa perusahaan di negara dengan sistem hukum yang kuat dan tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi cenderung mengadopsi asurans keberlanjutan untuk meningkatkan kredibilitas laporan mereka. (Kolk & Perego, 2010) mengidentifikasi bahwa determinan adopsi asurans keberlanjutan dipengaruhi oleh faktor seperti ukuran perusahaan, industri, dan tekanan dari pemangku kepentingan. (Junior et al., 2014) dalam analisis historis mereka menemukan bahwa praktik asurans keberlanjutan telah berkembang secara global, meskipun masih terdapat variasi yang signifikan dalam cakupan dan standar yang digunakan. (Farooq & de Villiers, 2017) melakukan tinjauan literatur komprehensif yang menyoroti bahwa pasar untuk jasa asurans keberlanjutan masih menghadapi tantangan dalam hal standardisasi dan kredibilitas penyedia jasa.

Di tingkat nasional, penelitian tentang asurans keberlanjutan di Indonesia masih terbatas. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada kepatuhan pelaporan keberlanjutan dan kualitas pengungkapan ESG, tanpa membahas secara mendalam peran asurans keberlanjutan dalam memperkuat transparansi. Penelitian yang ada umumnya belum menganalisis secara spesifik bagaimana asurans keberlanjutan dapat mengurangi risiko *greenwashing* dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengkaji kesiapan perusahaan Indonesia dalam menghadapi standar pengungkapan keberlanjutan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2 yang akan efektif pada 2027. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis peran asurans keberlanjutan dalam memperkuat transparansi pengungkapan ESG pada perusahaan publik di Indonesia selama periode 2023–2025, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan yang relevan dengan konteks Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori pendukung. Jensen & Meckling, (1976) dalam teori keagenan menjelaskan adanya ikatan keagenan, yaitu bahwa suatu industri merupakan kumpulan kontrak antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Manajemen adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Teori agensi menjelaskan hubungan antara manajer (agen) dan pemangku kepentingan (prinsipal). Asimetri informasi muncul ketika manajer memiliki informasi lebih banyak daripada pemangku kepentingan. Jaminan keberlanjutan mengurangi asimetri ini dengan menyediakan verifikasi independen atas informasi ESG, sehingga meningkatkan persepsi keandalan.

R. Edward Freeman (1984) dalam teori pemangku kepentingan menekankan pentingnya memenuhi harapan para pemangku kepentingan untuk mempertahankan legitimasi dan kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Dari perspektif ini, jaminan keberlanjutan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dengan meningkatkan persepsi akan keandalan dan transparansi informasi ESG, sehingga memperkuat akuntabilitas perusahaan terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan. Teori legitimasi berpendapat bahwa organisasi harus beroperasi sesuai dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat agar dapat bertahan, dengan memandang hubungan mereka dengan publik sebagai kontrak sosial. Teori ini menjelaskan perilaku korporat, terutama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), sebagai strategi untuk memperoleh atau mempertahankan penerimaan publik dengan menyelaraskan kegiatan dengan tuntutan masyarakat, menunjukkan transparansi, dan menghindari sanksi yang dapat mengancam keberadaannya.

Teori sinyal dikemukakan oleh Michael Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih banyak akan memberikan sinyal kepada pihak lain untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam konteks perusahaan, manajemen menyampaikan berbagai informasi kepada investor dan pemangku kepentingan sebagai sinyal mengenai kualitas dan prospek perusahaan. Dalam pelaporan ESG, *sustainability assurance* merupakan salah satu bentuk sinyal positif yang menunjukkan bahwa informasi keberlanjutan telah melalui proses verifikasi independen. Keberadaan asurans meningkatkan keyakinan bahwa informasi yang disajikan lebih andal, objektif, dan dapat dipercaya dibandingkan laporan yang tidak memperoleh asurans. Dengan demikian, *sustainability assurance* menjadi sinyal kredibilitas perusahaan dalam menerapkan praktik bisnis yang transparan dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran asurans keberlanjutan dalam memperkuat transparansi pengungkapan ESG pada perusahaan publik di Indonesia tahun 2023–2025. Fokus ini relevan karena transparansi ESG tidak hanya bergantung pada banyaknya informasi yang disampaikan, tetapi juga pada kualitas, keterukuran, konsistensi, dan keterverifikasian informasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran asurans keberlanjutan dalam memperkuat transparansi pengungkapan ESG, mengidentifikasi tantangan penerapannya, serta merumuskan strategi penguatan yang relevan bagi perusahaan publik di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan di bidang tata kelola perusahaan dan pelaporan keberlanjutan, khususnya dalam memahami peran asurans keberlanjutan sebagai mekanisme penguatan transparansi pengungkapan ESG. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan dalam merancang strategi pengungkapan ESG yang lebih transparan dan kredibel, bagi regulator dalam merumuskan kebijakan penguatan asurans keberlanjutan, bagi penyedia jasa asurans dalam mengembangkan kapasitas dan standar praktik, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai rujukan untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas asurans keberlanjutan di Indonesia.

METODE PENILITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam peran asurans keberlanjutan dalam memperkuat transparansi pengungkapan ESG pada perusahaan publik di Indonesia. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian statistik, tetapi pada analisis konseptual, regulatif, dan praktik pelaporan keberlanjutan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan teknik analisis isi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah regulasi, standar pelaporan, publikasi institusional, dan literatur akademik yang relevan dengan ESG, transparansi pengungkapan, dan asurans keberlanjutan. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kualitas pengungkapan ESG, mekanisme asurans, dan transparansi informasi.

Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, standar pengungkapan keberlanjutan, serta artikel ilmiah yang membahas *sustainability assurance* dan *ESG disclosure*. Periode kajian difokuskan pada tahun 2023–2025 karena periode ini mencerminkan fase penting peningkatan pelaporan keberlanjutan dan penguatan standar ESG di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Dokumen yang relevan dikumpulkan, dibaca, dan diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian. Tema utama yang dianalisis mencakup perkembangan pelaporan ESG, transparansi informasi, peran asurans keberlanjutan, tantangan implementasi, dan strategi penguatan pelaporan.

Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, reduksi data, yaitu menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, kategorisasi data, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tema. Ketiga, interpretasi data, yaitu menghubungkan temuan dengan teori legitimasi, teori pemangku kepentingan, dan teori sinyal. Keempat, penarikan kesimpulan, yaitu menyusun temuan mengenai peran asurans keberlanjutan dalam memperkuat transparansi pengungkapan ESG.

Periode penelitian di tahun 2023-2025 karena merupakan fase krusial peningkatan kepatuhan laporan keberlanjutan serta periode persiapan menuju konvergensi standar global IFRS S1 dan IFRS S2 di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pengungkapan ESG Perusahaan Publik di Indonesia Tahun 2023–2025

Perkembangan pengungkapan ESG perusahaan publik di Indonesia selama tahun 2023–2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh dorongan regulasi, tuntutan investor, perhatian masyarakat terhadap keberlanjutan, dan meningkatnya kesadaran perusahaan mengenai pentingnya reputasi ESG. Perusahaan publik mulai menempatkan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi komunikasi korporasi, bukan hanya sebagai dokumen pelengkap laporan tahunan.

Kewajiban pelaporan keberlanjutan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan publik untuk menyampaikan informasi terkait kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Regulasi ini menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari praktik tata kelola perusahaan, terutama bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Peningkatan jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan menunjukkan bahwa pelaporan ESG semakin diterima sebagai praktik umum di pasar modal Indonesia. Data BEI yang menunjukkan 882 perusahaan tercatat telah menerbitkan laporan keberlanjutan sampai Desember 2024 memperlihatkan bahwa kepatuhan pelaporan sudah relatif tinggi.

Namun, aspek kuantitas belum cukup untuk menggambarkan transparansi. Transparansi pengungkapan ESG menuntut perusahaan tidak hanya menerbitkan laporan, tetapi juga menyajikan informasi yang material, terukur, konsisten, dan dapat diverifikasi. Dalam praktiknya, masih terdapat perusahaan yang menyajikan informasi ESG secara umum, berulang, dan kurang didukung data kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama pada periode 2023–2025 bukan lagi sekadar mendorong perusahaan menerbitkan laporan, tetapi meningkatkan kualitas transparansi pengungkapan.

Peran Asurans Keberlanjutan dalam Memperkuat Transparansi ESG

Asurans keberlanjutan memiliki peran penting dalam memperkuat transparansi pengungkapan ESG karena berfungsi sebagai mekanisme verifikasi independen. Melalui asurans, informasi ESG yang disampaikan perusahaan tidak hanya berasal dari klaim internal, tetapi telah diperiksa oleh pihak independen berdasarkan prosedur tertentu.

Peran pertama asurans keberlanjutan adalah meningkatkan keandalan data ESG. Data ESG sering kali berasal dari berbagai unit perusahaan, seperti operasional, sumber daya manusia, lingkungan, hukum, keuangan, dan CSR. Tanpa mekanisme pemeriksaan, data tersebut berisiko tidak konsisten atau sulit ditelusuri. Proses asurans mendorong perusahaan menyediakan bukti pendukung atas setiap data yang dilaporkan, sehingga informasi menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.

Peran kedua adalah memperkuat keterukuran informasi. Laporan ESG yang transparan harus menyajikan indikator kuantitatif, seperti jumlah emisi, konsumsi energi, penggunaan air, jumlah limbah, tingkat kecelakaan kerja, komposisi karyawan, pelatihan, pengaduan pelanggan, dan kasus kepatuhan. Asurans membantu memastikan bahwa indikator tersebut dihitung dengan metode yang jelas dan terdokumentasi.

Peran ketiga adalah meningkatkan konsistensi antarperiode. Transparansi ESG membutuhkan informasi yang dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Asurans dapat menilai apakah perusahaan menggunakan indikator yang konsisten dan memberikan penjelasan apabila terjadi perubahan metode pengukuran. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat menilai tren kinerja ESG secara lebih objektif.

Peran keempat adalah mendorong keseimbangan informasi. Laporan ESG yang transparan tidak hanya menonjolkan keberhasilan perusahaan, tetapi juga menjelaskan tantangan, risiko, dan area yang masih perlu diperbaiki. Proses asurans dapat mendorong perusahaan untuk menghindari laporan yang terlalu promosi dan lebih menampilkan informasi secara seimbang.

Peran kelima adalah memperkuat akuntabilitas manajemen. Ketika informasi ESG diasuransikan, manajemen perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan klaim keberlanjutan. Hal ini mendorong perusahaan membangun sistem pengumpulan data, pengendalian internal, dan tata kelola ESG yang lebih baik.

Asurans Keberlanjutan sebagai Mekanisme Pencegahan Greenwashing

Salah satu persoalan utama dalam pengungkapan ESG adalah risiko *greenwashing*. *Greenwashing* dapat terjadi ketika perusahaan menyampaikan klaim keberlanjutan yang tidak didukung oleh praktik nyata atau data yang dapat diverifikasi. Dalam konteks perusahaan publik, *greenwashing* dapat merugikan investor, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya karena informasi yang tidak akurat dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

Asurans keberlanjutan dapat mengurangi risiko *greenwashing* melalui pemeriksaan independen terhadap klaim ESG. Misalnya, ketika perusahaan menyatakan telah menurunkan emisi, mengurangi limbah, meningkatkan kesejahteraan karyawan, atau

menjalankan tata kelola antikorupsi, klaim tersebut perlu didukung oleh data dan bukti. Penyedia asurans akan menilai apakah klaim tersebut memiliki dasar yang memadai.

Asurans juga membantu memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memilih informasi positif untuk ditampilkan. Laporan ESG yang baik harus menyajikan gambaran yang seimbang antara capaian, tantangan, risiko, dan target perbaikan. Dengan demikian, asurans membantu mengubah pelaporan ESG dari sekadar alat pencitraan menjadi instrumen akuntabilitas.

Selain itu, kehadiran Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia versi 2 pada 2025 memperkuat kebutuhan terhadap klaim keberlanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan. TKBI menjadi salah satu rujukan penting dalam mengklasifikasikan aktivitas ekonomi yang mendukung keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah "hijau", "berkelanjutan", atau "ramah lingkungan" tanpa dasar klasifikasi dan data yang jelas.

Transparansi ESG dan Kepentingan Investor

Investor merupakan pihak yang sangat membutuhkan transparansi pengungkapan ESG. Informasi ESG digunakan untuk menilai risiko jangka panjang, reputasi, tata kelola, kepatuhan, serta kemampuan perusahaan menghadapi perubahan regulasi dan tekanan pasar. Informasi ESG yang tidak transparan dapat menimbulkan asimetri informasi antara perusahaan dan investor.

Asurans keberlanjutan membantu mengurangi asimetri informasi tersebut. Ketika laporan ESG telah melalui proses asurans, investor memperoleh keyakinan lebih besar bahwa informasi yang disampaikan bukan sekadar klaim internal. Hal ini penting terutama bagi investor institusional yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam keputusan investasi.

Dalam perspektif teori sinyal, perusahaan yang melakukan asurans terhadap laporan ESG mengirimkan sinyal positif kepada pasar. Sinyal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap transparansi dan bersedia mempertanggungjawabkan informasi yang disampaikan. Hal ini dapat memperkuat persepsi investor terhadap kualitas tata kelola perusahaan.

Namun, manfaat asurans bagi investor sangat bergantung pada ruang lingkup dan kualitas asurans. Jika asurans hanya mencakup sebagian kecil indikator, maka tingkat keyakinan yang diberikan juga terbatas. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengungkapkan secara jelas ruang lingkup, standar, tingkat asurans, dan pihak penyedia asurans.

Transparansi ESG dan Kepentingan Regulator

Regulator membutuhkan informasi ESG yang transparan untuk memastikan bahwa perusahaan publik menjalankan prinsip keberlanjutan secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, laporan ESG yang diasuransikan dapat membantu regulator memperoleh informasi yang lebih andal. Asurans mendorong perusahaan memperkuat sistem pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan, sehingga pengawasan regulasi menjadi lebih efektif.

Perkembangan Standar Pengungkapan Keberlanjutan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2 di Indonesia juga menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap informasi keberlanjutan yang lebih terstruktur dan berkualitas. DSK IAI telah mengesahkan standar tersebut pada 1 Juli 2025 dan menetapkan efektivitasnya mulai 1 Januari 2027. Meskipun standar ini baru berlaku efektif pada 2027, periode 2023–2025 menjadi masa persiapan penting bagi perusahaan publik untuk memperbaiki sistem pelaporan ESG.

Dengan adanya standar yang lebih terstruktur, kebutuhan terhadap asurans juga semakin besar. Standar pengungkapan keberlanjutan menuntut perusahaan menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan, termasuk informasi risiko dan peluang

keberlanjutan. Informasi semacam ini membutuhkan sistem data dan tata kelola yang kuat agar dapat diverifikasi secara independen.

Tantangan Penerapan Asurans Keberlanjutan di Indonesia

Penerapan asurans keberlanjutan pada perusahaan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah kesiapan data ESG internal. Banyak perusahaan belum memiliki sistem data ESG yang terintegrasi. Data keberlanjutan sering tersebar di berbagai unit kerja dan belum memiliki standar pencatatan yang sama. Hal ini membuat proses asurans menjadi sulit karena data tidak selalu lengkap, konsisten, atau terdokumentasi.

Tantangan kedua adalah pemahaman terhadap materialitas ESG. Sebagian perusahaan masih memandang ESG sebagai aktivitas tambahan atau program CSR, bukan sebagai bagian dari strategi bisnis dan manajemen risiko. Akibatnya, laporan ESG lebih banyak menampilkan kegiatan sosial daripada isu material yang benar-benar memengaruhi keberlanjutan perusahaan.

Tantangan ketiga adalah biaya asurans. Proses asurans membutuhkan sumber daya tambahan, terutama apabila dilakukan oleh pihak independen dengan standar tinggi. Bagi perusahaan besar, biaya ini dapat dianggap sebagai investasi tata kelola. Namun, bagi perusahaan yang lebih kecil, biaya asurans dapat menjadi hambatan.

Tantangan keempat adalah kualitas dan independensi penyedia asurans. Efektivitas asurans sangat bergantung pada kompetensi pihak yang melakukan pemeriksaan. Penyedia asurans harus memahami standar pelaporan, audit, isu lingkungan, isu sosial, tata kelola, serta karakteristik industri perusahaan. Apabila kompetensi dan independensi tidak memadai, proses asurans berisiko menjadi formalitas.

Tantangan kelima adalah belum seragamnya praktik asurans. Perusahaan dapat menggunakan standar, cakupan, dan tingkat asurans yang berbeda. Sebagian perusahaan hanya melakukan asurans terhadap indikator tertentu, sedangkan sebagian lain melakukan asurans terhadap laporan secara lebih luas. Variasi ini menyulitkan pemangku kepentingan dalam membandingkan kualitas transparansi antarperusahaan.

Strategi Penguatan Transparansi ESG melalui Asurans Keberlanjutan

Untuk memperkuat transparansi pengungkapan ESG melalui asurans keberlanjutan, perusahaan publik perlu melakukan beberapa strategi. Pertama, perusahaan perlu membangun sistem data ESG yang terintegrasi. Data ESG harus dicatat secara berkala, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri. Sistem ini penting agar informasi yang disampaikan dalam laporan dapat diverifikasi secara memadai.

Kedua, perusahaan perlu memperkuat tata kelola ESG. Pengungkapan ESG tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab unit CSR atau komunikasi perusahaan. Direksi, dewan komisaris, komite audit, komite risiko, dan unit keberlanjutan perlu terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait ESG.

Ketiga, perusahaan perlu melakukan analisis materialitas yang lebih kuat. Isu yang diungkapkan dalam laporan ESG harus benar-benar relevan dengan aktivitas bisnis, risiko perusahaan, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Analisis materialitas yang baik akan membuat laporan lebih fokus dan tidak sekadar berisi daftar kegiatan.

Keempat, perusahaan perlu memperjelas ruang lingkup asurans. Laporan keberlanjutan harus menjelaskan indikator apa saja yang diasuransikan, standar apa yang digunakan, siapa penyedia asurans, serta apakah asurans dilakukan dalam bentuk *limited assurance* atau *reasonable assurance*. Transparansi mengenai asurans sama pentingnya dengan transparansi isi laporan ESG itu sendiri.

Kelima, perusahaan dapat menerapkan asurans secara bertahap. Bagi perusahaan yang belum siap melakukan asurans secara menyeluruh, proses dapat dimulai dari indikator yang paling material, seperti emisi, energi, keselamatan kerja, kepatuhan, antikorupsi, atau pengelolaan limbah. Setelah sistem data membaik, cakupan asurans dapat diperluas.

Keenam, regulator dan asosiasi profesi perlu memperkuat pedoman teknis terkait asurans ESG. Pedoman yang lebih jelas dapat membantu perusahaan dan penyedia jasa asurans memiliki standar minimum yang sama. Hal ini penting agar praktik asurans di Indonesia tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar meningkatkan transparansi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa asurans keberlanjutan memiliki peran strategis dalam memperkuat transparansi pengungkapan ESG pada perusahaan publik di Indonesia tahun 2023–2025. Periode tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, terutama karena dorongan regulasi dan meningkatnya perhatian pasar terhadap ESG. Namun, peningkatan kuantitas laporan belum otomatis menunjukkan peningkatan transparansi. Asurans keberlanjutan berperan dalam meningkatkan keandalan data ESG, memperkuat keterukuran informasi, menjaga konsistensi pelaporan, mendorong keseimbangan informasi, dan memperkuat akuntabilitas manajemen. Selain itu, asurans juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan greenwashing karena klaim keberlanjutan perusahaan diuji melalui proses verifikasi independen.

Meskipun demikian, penerapan asurans keberlanjutan di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kesiapan data internal, pemahaman materialitas yang belum merata, biaya asurans, kualitas penyedia asurans, dan variasi standar yang digunakan. Oleh karena itu, perusahaan publik perlu memperkuat sistem data ESG, tata kelola keberlanjutan, analisis materialitas, serta transparansi ruang lingkup asurans. Dengan berkembangnya Standar Pengungkapan Keberlanjutan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2 serta Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia, perusahaan publik perlu mempersiapkan diri menuju praktik pelaporan ESG yang lebih kredibel dan terverifikasi. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan asurans keberlanjutan dalam pelaporan ESG akan lebih siap menghadapi tuntutan transparansi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan memperkuat daya saing jangka panjang.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada perusahaan publik untuk membangun sistem data ESG yang terintegrasi, memperkuat tata kelola keberlanjutan dengan melibatkan dewan komisaris dan direksi secara aktif, serta meningkatkan analisis materialitas agar laporan ESG lebih fokus pada isu yang benar-benar relevan dengan bisnis dan pemangku kepentingan. Perusahaan juga disarankan untuk memperjelas ruang lingkup asurans dalam laporan keberlanjutan, mencakup indikator yang diasuransikan, standar yang digunakan, dan tingkat asurans yang diberikan. Bagi regulator, disarankan untuk memperkuat pedoman teknis asurans keberlanjutan dan mendorong harmonisasi standar praktik di tingkat nasional agar lebih selaras dengan standar global, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan asurans independen. Bagi penyedia jasa asurans, disarankan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi multidisipliner, meliputi akuntansi, audit, manajemen risiko, lingkungan, sosial, dan tata kelola, guna menjamin kualitas proses asurans. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai efektivitas asurans keberlanjutan dalam meningkatkan transparansi pengungkapan ESG serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi asurans keberlanjutan di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya standar pengungkapan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2.

REFERENSI

Al-Shaer, H., & Zaman, M. (2018). Credibility of sustainability reports: The contribution of audit committees. *Business Strategy and the Environment*, *27*(7), 973–986.

Alsahali, K., Malagueño, R., & Marques, A. (2024). Board attributes and companies' choice of sustainability assurance providers. *Accounting and Business Research*, *54*(4), 392–422. https://doi.org/10.1080/00014788.2023.2181141

Bursa Efek Indonesia. (2025). Perkuat transparansi data ESG, BEI luncurkan ESG reporting for listed companies. Bursa Efek Indonesia.

Channuntapipat, C., Samsonova-Taddei, A., & Turley, S. (2020). Variation in sustainability assurance practice: An analysis of accounting versus non-accounting providers. *The British Accounting Review*, *52*(2), 100843. https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100843

Farooq, M. B., & de Villiers, C. (2017). The market for sustainability assurance services: A comprehensive literature review and future avenues for research. Pacific Accounting Review, 29(1), 79–106.

Grediani, E., & Kapti, A. S. M. K. (2023). Pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dengan moderasi peran audit internal. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, *12*(2), 122–135. https://doi.org/10.32639/jiak.v12i2.732

Ika, S. R., Nugroho, J. P., Achmad, N., & Widagdo, A. K. (2021). The impact of corporate governance on environmental reporting: Evidence from the Indonesian manufacturing industry. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *739*(1), 012030. https://doi.org/10.1088/1755-1315/739/1/012030

Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). Indonesia launches sustainability disclosure standards based on IFRS S1 and S2. IAI Global.

International Sustainability Standards Board. (2023). IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information. IFRS Foundation.

International Sustainability Standards Board. (2023). IFRS S2 Climate-related Disclosures. IFRS Foundation.

Josua, R., & Septiani, A. (2020). Analisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun 2015–2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, *9*(3), 1–9.

Junior, R. M., Best, P. J., & Cotter, J. (2014). Sustainability reporting and assurance: A historical analysis on a worldwide phenomenon. Journal of Business Ethics, 120(1), 1–11.

Kolk, A., & Perego, P. (2010). Determinants of the adoption of sustainability assurance statements: An international investigation. Business Strategy and the Environment, 19(3), 182–198.

Liu, Z., Jubb, C., & Abhayawansa, S. (2025). Choice of financial audit firm and ESG assurance firm: The role of board of director characteristics. *The British Accounting Review*, *57*(4).

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia versi 2. OJK.

Setiawan, E. M., & Ridaryanto, P. (2022). Analisis pengaruh efektifitas dewan komisaris dan komite audit terhadap kualitas sustainability report. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*, *19*(1), 126–149. https://doi.org/10.25170/balance.v19i1.3510

Simnett, R., Vanstraelen, A., & Chua, W. F. (2009). Assurance on sustainability reports: An international comparison. The Accounting Review, 84(3), 937–967.